

Amarah Prabowo Meledak Melihat Komandan TNI Kabur dari Pertempuran

JAKARTA (IM) – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengisahkan amarahnya yang meledak ketika melihat ada komandan TNI kabur musuh. Komandan tersebut dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan militer yang baik.

Hal itu diungkapkannya dalam buku biografinya 'Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto'. (

Mantan Danjen Kopassus ini pun blak-blakan menuliskan secara khusus dalam Bab XII tentang Contoh-Contoh Pemimpin yang Tidak benar. Di antaranya perilaku komandan yang mau enaknya sendiri.

"Suatu ketika terjadi kontak tembak dengan musuh. Komandan pasukan yang memimpin grup itu lantas

manggil wakilnya," kata Prabowo dalam bukunya tersebut, Selasa (23/11).

Mirisnya wakil komandan itu diminta mengambil alih pasukan dan memimpin serbuan di sebuah bukit. Dalam pandangan Prabowo, sikap komandan itu sama sekali tak mencerminkan kepemimpinan militer. Semestinya komandan berada di tengah-tengah anak buah, termasuk dalam pertempuran.

Bukan tanpa alasan dia menceritakan kisah-kisah tersebut. Prabowo ingin agar generasi muda tidak salah jalan. "Terutama mereka yang ingin menjadi pemimpin yang baik, saya ceritakan ini bukan untuk menjelekkan orang. Tapi agar saudara-saudara menghindari dan tidak melakukan hal-hal seperti ini," ujarnya. ● han

Partai Demokrat Bersyukur PTUN Tolak Gugatan Kubu Moeldoko

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya bersyukur atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Hamdan menilai, majelis hakim telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dalam memutus perkara tersebut.

"Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dalam menolak gugatan Moeldoko," kata Hamdan dalam siaran pers, Selasa (23/11).

Menurut Hamdan, putusan PTUN itu sekaligus mengonfirmasi bahwa putusan Menteri Hukum dan

HAM Yasonna Laoly yang menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan PTUN, lanjut Hamdan, juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara.

PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan Moeldoko dan eks kader Demokrat Jhoni Allen Marbun terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang.

Dalam gugatannya, penggugat meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan Surat Menteri ukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.UM.01.10-47, Perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025, tanggal, 31 Maret. ● mei

Siapapun Boleh Daftar Menjadi Kandidat Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo

JAKARTA (IM) - Partai Perindo menjadi pelopor partai politik yang mengusung demokrasi berbasis digital di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe-soedibjo saat memberikan arahan secara virtual dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III Partai Perindo Papua Barat yang berlangsung di Kota Sorong, Senin (22/11).

"Partai Perindo adalah partai yang pertama memulai gerakan demokrasi melalui digitalisasi, melalui teknologi informasi," ujar Hary Tanoe. Digitalisasi salah satunya diterapkan Partai Perindo dalam penjurian calon-calon anggota legislatif untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Secara digital, nanti akan dilakukan konvensi rakyat untuk menjangkau calon-calon anggota legislatif dari semua tingkatan, baik tingkat II, tingkat I maupun tingkat nasional," kata Hary.

Hary mengungkapkan pendaftaran konvensi Rakyat Partai Perindo akan dimulai pada 25 November 2021 melalui website Partai Perindo, yaitu www.pertai-perindo.com. Ada tiga tujuan digulirkannya konvensi rakyat tersebut, yaitu Pertama, memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera.

"Semua WNI bisa mendaftarkan diri di Konvensi Rakyat sebagai calon anggota legislatif yang pada akhirnya diharapkan bisa duduk sebagai anggota Dewan," tutur Hary.

Kedua, memberikan pilihan yang lebih luas bagi Partai Perindo.

"Menjangkau tokoh-tokoh atau figur-figur yang berkompeten untuk membangun daerahnya masing-masing," jelasnya.

Ketiga, guna menegaskan bahwa Partai Perindo memulai demokrasi secara teknologi informasi yang pelaksanaannya dilakukan secara digital.

"Kita adalah partai yang modern, yang mengawali demokrasi melalui teknologi informasi atau digitalisasi," ujarnya.

Tak hanya Konvensi Rakyat, Partai Perindo menerapkan digitalisasi dalam pendaftaran keanggotaan, informasi kepartaian, kegiatan-kegiatan partai semisal webinar, dan lainnya. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Edison Ompe menilai keputusan Partai Perindo menerapkan digitalisasi merupakan langkah yang luar biasa.

"Kita tahu bahwa tahun 2000 ini masuk anak-anak milenial. Kita masuk ke revolusi industri 4.0. Mainkan peran dengan cara seperti itu. Jadi, kita tidak lagi pakai model manual, tapi menggunakan cara-cara yang tadi. Luar biasa," katanya.

Mewakili Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, dia pun memberikan ucapan selamat dan semangat kepada seluruh kader Partai Perindo yang mengikuti Muskerwil tersebut.

"Saya mewakili Bapak Gubernur menyampaikan selamat dan sukses dalam Muskerwil III Partai Perindo Papua Barat. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat aman, sejahtera dan bermartabat," ujar Edison. ● mei

2 Polhukam

FOTO/ANT



PAMERAN FOTO WARNA WARNI PARLEMEN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menandatangani foto saat membuka Pameran Warna-Warni Parlemen X di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11). Pameran yang menampilkan 101 karya dari 20 wartawan foto parlemen tersebut bertema Bersatu Lawan Pandemi dan akan berlangsung hingga 30 November 2021.

Fatia dan Haris Azhar Tegaskan Siap Hadapi Luhut Panjaitan di Pengadilan

Luhut menyebut tidak perlu ada lagi upaya mediasi yang dilakukan. Dia berharap proses hukum kasus pencemaran nama baik yang dituduhkannya kepada Faria dan Haris berlanjut di pengadilan.

JAKARTA (IM) - Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyatakan siap melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di pengadilan.

Luhut laporkan Fatia dan aktivis hak asasi manusia

(HAM) Haris Azhar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

"Jika ingin ke pengadilan, kami siap dan kami sudah siapkan berbagai data yang memang sudah dipersiapkan untuk proses tersebut," kata Fatia kepada wartawan di

Mapolda Metro Jaya, Selasa (23/11).

Menurut Fatia, pengadilan bisa menjadi wadah bagi dia dan Haris Azhar untuk menunjukkan bukti-bukti dari apa yang mereka sampaikan mengenai kondisi di Papua.

"Ya enggak masalah, justru pengadilan bisa menjadi ruang, sehingga publik bisa tahu seluas-luasnya soal situasi yang terjadi di Papua," ungkap Fatia.

Fatia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik Luhut, Selasa (23/11). Dia diminta memberikan penjelasan men-

genai pernyataannya tentang kondisi di Papua dalam sesi wawancara di kanal Youtube Haris Azhar.

Kepada penyidik, Fatia mengatakan, pernyataan yang dia sampaikan dalam sesi wawancara itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan Haris menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Dia dimintai keterangan perihal kanal YouTube-nya yang mengunggah video wawancara dengan Fatia Maulidiyanti.

"Pertama, mediumnya akun channel saya, itu seperti apa, itu satu. Yang kedua, peruntukan identitas itu untuk apa di materi ini," kata Haris.

Luhut telah memutuskan untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Hal tersebut disampaikan Luhut usai proses mediasi dengan kedua terlapor pada Senin pekan lalu di Mapolda Metro Jaya tidak terlaksana.

Iya, biar sekali-sekali belajarlah, kita ini kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab," ujar Luhut usai menghadiri undangan mediasi di Mapolda Metro Jaya, Senin lalu.

Menurut Luhut, dia memenuhi undangan mediasi yang sudah beberapa kali tertunda. Namun, Haris Azhar dan Fatia justru tidak hadir dalam mediasi yang jadwalnya ditentukan oleh kedua terlapor.

"Jadi kalau proses yang sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," kata Luhut.

Dia menyebut bahwa tidak perlu ada lagi upaya mediasi yang dilakukan. Dia berharap proses hukum kasus pencemaran nama baik tersebut tetap berlanjut hingga persidangan.

"Enggak usah, di pengadilan aja nanti. Kalau dia yang salah, ya salah. Kalau saya yang

salah, ya saya gitu," kata Luhut.

Sementara itu, Haris Azhar dan Fatia menjelaskan bahwa ketidakhadiran mereka dalam mediasi pada Senin lalu sudah diinformasikan kepada penyidik. Fatia mengatakan, dia dan Haris Azhar berhalangan hadir dalam mediasi karena sedang berada di luar kota. Hal itu disampaikan pihaknya lewat surat jawaban yang dilayangkan pada 13 November 2021.

"Kami sudah menyampaikan surat jawaban yang pada intinya meminta penundaan mediasi karena Fatia Maulidiyanti berhalangan untuk hadir pada tanggal 15 November 2021," ujar Fatia dalam keterangannya, Selasa lalu.

Agenda mediasi juga sudah pernah dijadwalkan pada 21 Oktober 2021. Saat itu, pihak Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hadir di Mapolda Metro Jaya. Namun, pihak Luhut tidak hadir. Luhut, melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube. Dalam kanal YouTube milik Haris, keduanya menyebutkan Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Sebelum melapor ke polisi, Luhut dua kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di akun YouTube Haris. Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan, dua somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab kliennya.

Menurut Julius, kata "bermain" merupakan cara Fatia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal kepemilikan tambang di Intan Jaya.

"Kata 'bermain' itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO (non-governmental organization). Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fatia dalam bahasa yang sederhana," ujar Julius. ● han

BPOM Minta 2 Jabatan Baru Agar Diisi Anggota Polri

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyiapkan personelnya guna mengisi struktur organisasi baru.

"Dan dari sisi regulasi itu memang diizinkan, oleh karenanya Kepala Balai POM menyampaikan ke bapak Kapolri ada dua jabatan yang nanti akan diisi dari unsur kepolisian," terang Dedi.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, di dalam pelaksanaannya nanti terkait jabatan Deputi Penindakan, untuk segi penegakan hukum bakal mengedepankan Ultimium Remedium.

"Penegakan hukum adalah langkah yang terakhir ketika melakukan penegakan hukum kepada para pelaku usaha. Jadi utamakan dulu adalah unsur pembinaan, pak Kapolri setuju. Memang seperti itu dalam hal penegakan hukum bahwa unsur pembinaan adalah yang utama. Apabila unsur pembinaan maksimal sudah dilakukan masih ada pelanggaran, baru penegakan hukum dilakukan," ucap Dedi. ● Ius



MENSOS TINJAU PEMBAGIAN BANSOS

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina (tiga kiri) meninjau penyaluran bantuan sosial di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/11). Kemensos menyalurkan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa Atensi, PKH, Sembako dan bantuan Rutilahu di daerah tersebut.

Kasus Pengadaan Tanah, KPK Kembali Panggil Kepala Sekolah SMKN 7 Tangsel

JAKARTA (IM) - Kepala Sekolah SMKN 7 Tangerang Selatan, Aceng Haruji kembali dipanggil Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/11).

Aceng bakal diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Anggaran 2017.

"Hari ini (23/11) Penyidikan perkara terkait dugaan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Selain memeriksa Aceng, tim penyidik juga bakal memeriksa seorang Notaris

bernama Suningsih. Keduanya bakal diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya penyidik KPK pernah mengulimatung Aceng untuk kooperatif karena yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan.

"KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11) lalu.

KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangsel, tahun anggaran 2017. KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan

sekolah di Tangsel tersebut.

Namun, KPK masih enggan membeberkan secara terang siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK berjanji bakal mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

Sejalan dengan proses penyidikan kasus tersebut, tim penyidik sudah menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang Banten, dan Bogor. Lokasi yang digeledah diantaranya yaitu, rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.

Dari penggeledahan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen barang elektronik, hingga dua unit mobil usai menggeledah sejumlah lokasi tersebut. KPK akan menganalisa lebih jauh dua unit mobil serta dokumen-dokumen yang diamankan tersebut guna proses penyitaan. ● han

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta PT Gaharu Alam Permai (dalam likuidasi) ("Perseroan") Nomor 124 tanggal 22 November 2021, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator. Sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditur yang memiliki tagihan kepada Perseroan, diminta mengirimkan bukti-bukti/dokumen pendukung secara tertulis kepada Likuidator dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, ke Ruko L'Agriola Blok B-21, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Tangerang, 24 November 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta PT Grahatama Asri Makmur (dalam likuidasi) ("Perseroan") Nomor 125 tanggal 22 November 2021, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator. Sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditur yang memiliki tagihan kepada Perseroan, diminta mengirimkan bukti-bukti/dokumen pendukung secara tertulis kepada Likuidator dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, ke Ruko L'Agriola Blok B-21, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Tangerang, 24 November 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
Direksi PT TURNAROUND ASSET INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 17 November 2021, para pemegang saham perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:
Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dalam Perseroan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham yang diambil seluruhnya oleh TA ASSET MANAGEMENT, Co., Ltd. selaku pemegang saham Perseroan dengan cara konversi utang Perseroan kepada pemegang saham.
Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 24 November 2021
Direksi
PT TURNAROUND ASSET INDONESIA

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
Dengan ini diumumkan bahwa 100% saham PT. TALANA SUKSES MAJU ("Perseroan") direncanakan akan diambil alih oleh investor baru. Pihak manapun yang berkepentingan atas pengambilalihan ini dapat menghubungi Perseroan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di alamat di bawah ini.

Jakarta, 24 November 2021
PT. TALANA SUKSES MAJU
SOHO CAPITAL @Podomoro City Lt. 16 Unit 16-06A,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470